



Judul : RUU Masyarakat Adat: Baleg serap masukan dari pelaku usaha
Tanggal : Rabu, 22 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Masyarakat Adat Baleg Serap Masukan Dari Pelaku Usaha

BADAN Legislasi (Baleg) DPR terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dengan menyerap masukan dari pelaku usaha, karena beririsan langsung dengan kawasan yang dihuni komunitas masyarakat adat.

Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri mengatakan, kehadiran para pelaku usaha diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai pengalaman nyata dan tantangan yang dihadapi dalam berinteraksi dengan masyarakat adat. Seperti tantangan hukum, administratif dan praktik di lapangan yang telah dilakukan perusahaan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat adat di sekitar wilayah usaha.

"Pembahasan RUU perlu menghimpun pandangan dari seluruh pemangku kepentingan agar regulasi yang disusun mampu mengakomodasi berbagai perspektif," harap Iman dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PT Agrinas Palma Nusantara, dan PT Barito Pacific BK, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, beleid baru tersebut tidak hanya memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Anggota Baleg DPR Benny K Harman menambahkan, regulasi yang tengah disusun

harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat tanpa mengesampingkan kebutuhan investasi sebagai bagian dari pembangunan nasional.

"Tak mungkin ekonomi tumbuh kalau tidak ada investasi. Jadi aturan ini kita buat supaya investasi bisa melindungi rakyat semua," ujar Benny Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Menurut Benny, keseimbangan tersebut penting agar beleid ini saat disahkan mampu menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi antara masyarakat adat dan pelaku usaha. Kepastian hukum yang jelas akan memberikan ruang bagi perlindungan hak masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pembentukan RUU ini, lanjut dia, juga menjadi kesempatan untuk memperkuat pendekatan yang lebih mengedepankan dialog dan keadilan dalam penyelesaian berbagai persoalan. Sehingga hubungan antara masyarakat adat, Pemerintah, dan dunia usaha dapat dibangun di atas prinsip saling menghormati serta kepastian hukum.

"Undang-undang ini adalah titik awal kita meninggalkan pendekatan lama yang *security approach* (pendekatan keamanan) dengan pendekatan yang berbasis kepentingan komunitas, keadilan dan masyarakat hukum adat. Ini yang paling penting," tegas politisi Demokrat ini. ■ TIF